

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Tinjauan ini bersumber dari beberapa referensi yaitu: *publik policy* oleh Riant Nugroho tahun 2009, serta *Good Governance* Nugroho tahun 2009, serta *Good Governance; Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah* oleh Joko Widodo tahun 2001. Secara umum, istilah kebijakan atau *policy* dimaknai sebagai perilaku seorang aktor (pejabat, suatu kelompok, atau suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Untuk dapat memahami lebih dalam, berikut beberapa pendapat ahli tentang konsep kebijakan publik. Pendapat *pertama*, oleh Nugroho (2009: 51-52) yang menyatakan bahwa :kebijakan publik merupakan bagian atau interaksi politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Bahkan kebijakan publik adalah *melting pot* atau hasil sintesis dinamika politik, ekonomi, sosial dan kultural tempat kebijakan itu sendiri berada. Kebijakan publik merupakan bentuk dinamika tiga dimensi kehidupan setiap Negara bangsa yaitu dimensi politik, dimensi hukum dan dimensi manajemen.

Pendapat *kedua*, oleh Laswell dalam Nugroho (2009: 85) menyatakan bahwa :Kebijakan publik secara sederhana dimaknai sebagai keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan

publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Pendapat *ketiga*, oleh Dye dalam Widodo (2001: 189) yang menyatakan bahwa :Kebijakan public merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan;apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi-nya, serta apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Pendapat *keempat*, oleh Kartasasmita masih dalam Widodo (2001: 180)mengemukakan bahwa :Kebijakan public adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak lakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah (*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs*).

B. Implementasi Kebijakan Publik

Tinjauan ini bersumber dari: *Publik Policy* oleh Riant Nugroho tahun 2009, *Kebijakan Publik; Teori, Proses dan Studi Kasus* oleh Budi Winarno tahun 2012, *Good Governance; Telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah* oleh Joko Widodo tahun 2001, dan *Teori Administrasi Publik* oleh Harbani Pasolong tahun 2007.

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Berikut pendapat-pendapat ahli tentang konsep implementasi kebijakan public :Pendapat *pertama*, oleh Nugroho (2008: 494) menyatakan bahwa:Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak

kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

Pendapat *kedua*, oleh Widodo (2001: 191) menyatakan bahwa: Sebuah kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realitas nyata. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Pendapat *ketiga*, oleh Van Mater dan Van Horn dalam Widodo (2001: 192) menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Pendapat *keempat*, oleh Purwanto (2012: 21) menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan publik adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang

dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Berdasarkan paran tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik yang dimaksud adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Lebih jauh, Purwanto (2012: 72) menjelaskan tentang proses implementasi kebijakan publik.

2. Model Implementasi Kebijakan

Nugroho (2008: 503-515) menyatakan bahwa, untuk memahami implementasi sebuah kebijakan, terdapat sembilan model implementasi kebijakan yang dapat dijadikan dasar teori yaitu model Edward, Van Mater dan Van Horn, Mazmania dan Sabatier, Hogwood dan Gunn, Goggin, Grindle, Elmore dan Model Jaringan. Namun dalam penelitian ini, hanya dua model yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka, mengingat dua model tersebut memiliki beberapa kemiripan, dan sesuai dengan *design* penelitian ini.

Model Mazmanian

Menurut Mazmanian ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni :

1. Karakteristik dari masalah (tractability of the problems)
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of structure implementation) :
 - a. Kejelasan isi kebijakan
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut.
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation) :

- a. Kondisi sosiasal ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
- b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
- c. Sikap dari kelompok pemilih
- d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

C. Kemiskinan

Tinjauan kemiskinan bersumber dari beberapa referensi yaitu *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* karya Edi Suharto tahun 2010, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* karya Ambar Teguh Sulistiyani tahun 2004, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* karya Randy R. Wrihatnolo tahun 2007.

1. Pengertian Kemiskinan

Terdapat berbagai pendapat yang menjelaskan tentang konsep kemiskinan, pada bagian ini akan dipaparkan beberapa pendapat ahli tentang konsep kemiskinan yang relevan dengan penelitian. Pendapat *pertama*, oleh Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2004: 27) yang menyatakan bahwa: Kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan (*welfare*) semata, tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi, angka ketergantungan tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Lebih lanjut, Sulistiyani (2004: 27-28) menyatakan bahwa:

Kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar.

Pendapat *kedua*, Suharto (2008: 132) menyatakan bahwa:

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah, bermatra multidimensional.

Kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang dan papan,
- b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih dan transportasi,
- c. Ketiadaan jaminan masa depan,
 - a. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual atau massal,
 - b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan sumberdaya alam,
 - c. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat,
- d. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan,
- e. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik atau mental,

- f. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial seperti anak terlantar, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil.

2. Dimensi Kemiskinan

Elis dalam Suharto (2010:133) kemiskinan terbagi dalam beberapa dimensi yaitu:

- a. Dimensi ekonomi, kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Standar kemiskinan dalam dimensi ini diukur dengan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*),
- b. Dimensi politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*).
- c. Dimensi sosial-psikologis, kemiskinan yang menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktifitas.

Lebih jauh Suharto (2008: 170-180) menyatakan bahwa kemiskinan dapat dikategorikan dalam empat kategori yaitu :

- a. *Kemiskinan Absolut*, yaitu keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidak mampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Penentuan kemiskinan absolut ini diukur melalui batas kemiskinan atau garis kemiskinan (*poverty line*) baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran,

kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah pengukuran biasanya dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau pengeluaran). Sehingga seseorang atau kelompok yang kemampuan ekonominya dibawah garis kemiskinan, dapat dikategorikan sebagai miskin secara absolut.

b. *Kemiskinan Relatif*, kemiskinan yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp.100.000 per kapita setiap bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan Rp.125.000 per bulan secara absolute dikategorikan tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp.200.000 per bulan, maka secara relatif orang tersebut termasuk dalam kategori miskin.

c. *Kemiskinan Kultural*, kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern. Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (*needs of achievement*), fatalis, berorientasi kemasalalu, tidak memiliki jiwa wirausaha merupakan ciri dari kemiskinan dalam kategori kultural.

d. *Kemiskinan Struktural*, kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Adanya praktik monopoli dan oligopoli dalam bidang ekonomi, akan menghasilkan mata rantai pemiskinan yang sulit dipecahkan. Sekuat apapun motivasi dan kerja keras seseorang, dalam

kondisi struktur yang demikian tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya. Karena aset dan akses terhadap sumber-sumber telah dikuasai oleh segolongan orang tertentu.

D. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat bersumber dari referensi: *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* oleh Jim Ife tahun 2008, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* oleh Harry Hikmat tahun 2010, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* oleh Ambar Teguh Sulistiyani tahun 2004, *Manajemen Pemberdayaan; Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* oleh Randy R. Wrihatnolo tahun 2002, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* oleh Edi Suharto tahun 2010.

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Harry (2010: 3) menyatakan bahwa konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Terdapat berbagai macam perspektif mengenai konsep dan definisi dari pemberdayaan masyarakat.

Pendapat *pertama*, oleh Sulistiyani (2004: 77) menyatakan bahwa :Pemberdayaan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses memberi daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pendapat *ke-dua*, oleh Pranarka dalam Sulistiyani (2004: 78) menyatakan bahwa :Pemberdayaan mengandung dua makna yaitu; pertama *to give power or authority* dimaknai sebagai pemberian kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Kedua *to give ability to or enable* dimaknai memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Pendapat *ke-tiga*, Wrihatnolo (2007: 75-76) menyatakan bahwa :Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau dengan istilah lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pendapat *ke-empat*, oleh Suharto (2010: 58) menyatakan bahwa :Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan; menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan, memperoleh barang-barang dan jasa yang diperlukan; serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pendapat *ke-lima*, oleh Ife (1995: 61-64) menyatakan bahwa :Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan dimaknai bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas: pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup yang meliputi kemampuan membuat keputusan, tempat tinggal dan pekerjaan; pendefinisian kebutuhan; ide dan gagasan; lembaga-lembaga yaitu kemampuan menjangkau, menggunakan lembaga sosial, pendidikan dan kesehatan; sumber-sumber yaitu kemampuan mobilisasi sumber-sumber formal dan informal; aktifitas ekonomi meliputi kemampuan produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa; serta reproduksi yang meliputi proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan kesehatan.

Pendapat *ke-enam*, oleh Mc Ardle dalam Harry (2010: 3) menyatakan bahwa :Pemberdayaan dan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuensi melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pertolongan dari hubungan eksternal. Berdasarkan pendapat tersebut, pemberdayaan dapat disimpulkan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pemberdayaan sebagai

tujuan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan secara umum adalah meningkatkan kemandirian individu/masyarakat yang tidak berdaya menjadi individu/masyarakat yang berdaya, tidak bergantung terhadap lingkungan eksternal, serta mampu mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Terdapat beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang hakikat pemberdayaan masyarakat.

Pertama, oleh Sulistiyani (2004: 80) menyatakan bahwa : Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat yang dimaksud adalah kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri dari atas kemampuan kognitif, konatif,

psikomotorik, afektif dengan penguasaan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal tersebut.

Kedua, oleh Kristiadi dalam Wrihatnolo (2007: 117) menyatakan bahwa :Ujung dari pemberdayaan masyarakat harus membuat masyarakat menjadi swadiri, mampu mengurus dirinya sendiri, swadana, mampu membiayai kebutuhan sendiri, dan swasebada, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan. Sehingga diketahui esensi pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya individu atau masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

E. Program KUBE (kelompok Usaha Bersama)

Tinjauan tentang Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bersumber dari dokumen-dokumen resmi Kementerian Sosial RI yang meliputi Pedoman Umum KUBE Buku Saku Pendamping tahun 2011.

1. Pengertian KUBE

Berdasarkan panduan umum, kelompok usaha bersama (KUBE) adalah : Media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya, aktifitas sosial ekonomi keluarga masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial mereka melalui kelompok dapat

berinteraksi, saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan.

2. Tujuan Program KUBE

Tujuan umum dari program Kelompok Usaha Bersama adalah :

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin
- b. Mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga miskin
- c. Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan public dan sistem jaminan kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan
- e. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah masalah kemiskinan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin.

3. Aspek KUBE

Penerima kegiatan penanggulangan kemiskinan masyarakat desa melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial adalah kelompok usaha bersama yang dikategorikan berkembang yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Bidang Kelembagaan
 - a. Anggota berusia 15 tahun keatas, sudah berkeluarga dan masih produktif.
 - b. Adanya program kegiatan secara jelas dan rinci.

- c. Adanya struktur organisasi dan pembagian tugas bagi semua anggota KUBE
- d. Adanya fungsi masing-masing anggota KUBE sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
- e. Melakukan pencatatan kegiatan dan administrasi pembukuan KUBE

2. Bidang sosial

- a. Adanya pertemuan anggota sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan
- b. Adanya kesadaran dan kemauan anggota kelompok untuk merubah kondisi/keadaan kearah kondisi kehidupan yang lebih baik.
- c. Adanya usaha simpan pinjam untuk kesejahteraan keluarga
- d. Adanya kesadaran pada anggota tentang pentingnya pendidikan bagi anggota keluarga dan masyarakat
- e. Tumbuhnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota maupun dengan lingkungannya, melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan

4. Kegiatan KUBE

Persiapan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi dan dinas sosial Kabupaten
persiapan kegiatan meliputi :

- a. Identifikasi dan seleksi, adalah kegiatan untuk mengetahui dan mendapatkan KUBE yang layak untuk dapat diusulkan mendapatkan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial
- b. Orientasi dan Observasi adalah kegiatan berupa pengamatan secara umum sebagai cara pengumpulan data dengan melihat budaya, adat kebiasaan, potensi dan sumber-sumber yang dimiliki oleh KUBE untuk dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan
- c. Penyuluhan sosial adalah suatu kegiatan penerangan tentang pemberdayaan kelompok usaha bersama yang dilaksanakan secara lisan, tertulis, maupun melalui peragaan. Kegiatan bertujuan untuk memberikan pengertian dan membangkitkan kesadaran serta motivasi KUBE untuk mengembangkan pengelolaan UEPnya.
- d. Bimbingan Sosial Dasar, adalah suatu kegiatan untuk memberikan motivasi, pengetahuan dan keterampilan, sehingga Kube memiliki persiapan untuk mengembangkan usaha dalam pengelolaan dana dengan harapan KUBE menyadari pentingnya program tersebut sebagai sarana meningkatkan keajahteraan sosial mereka.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa melalui BLPS ini dilaksanakan dalam upaya penguatan kembali kemampuan KUBE dalam mengelola dana stimulan UEP. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan ini sebagai berikut

1. Penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan.

Penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan kabupaten bertujuan untuk melakukan verifikasi langsung kelapangan untuk mendapatkan gambaran tentang usulan-usulan proposal yang telah direkomendasikan dinas sosial provinsi.

Dalam kesempatan ini dilakukan juga kunjungan langsung kelokasi KUBE untuk mengetahui gambaran kegiatan pengelolaan aktivitas UEP. Hasil penjajakan dan pemetaan kebutuhan ini sebagai upaya memastikan bahwa usulan program layak untuk dilaksanakan kabupaten yang bersangkutan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan BLPS dan membangun kesamaan persepsi terhadap proses dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan melalui sosialisasi ini dapat juga membangun kerjasama antar berbagai pihak yang terkait serta mendapatkan umpan balik terhadap rencana kegiatan. Pertemuan sosialisasi dilaksanakan dan difasilitasi oleh kementrian sosial dan bekerja sama dengan dinas/instansi sosial daerah dengan menghadirkan Dinas Sosial Provinsi, dinas sosial kabupaten yang mendapat program, Bappeda, Dinas teknis terkait.

3. Penyerahan Bantuan

Setelah semua data dan persyaratan KUBE, pendamping sudah lengkap (penetapan KUBE, Pendamping, rekening), maka dilanjutkan penyaluran dana stimulan UEP kepada KUBE melalui transfer ke masing-masing rekening.

4. Monitoring dan Evaluasi

Dilaksanakan oleh kementrian sosial dan sepenuhnya dibantu oleh dinas/instansi sosial daerah. Kegiatan monitoring ini ditujukan agar proses pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

F. Kerangka Pikir

Pemikiran awal yang melandasi penelitian ini adalah fakta masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia dalam dekade terakhir, serta tingginya komitmen Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui alokasi APBN yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun faktanya, capaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan justru mengalami perlambatan 1 – 1,5% setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya tidak selaras dengan besarnya alokasi anggaran yang telah dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program penyaluran kegiatan penanggulangan kemiskinan Masyarakat Desa merupakan bagian dari program perlindungan sosial (cluster I) dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. PKH telah diimplementasikan sejak tahun 2007 secara Nasional pada 34 Provinsi di Indonesia.

BLPS merupakan varian program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer) yaitu berupa pemberian sejumlah uang tunai atau hewan yang diberikan kepada kelompok Miskin penerima bantuan dalam periode tiga bulanan, selama enam tahun implementasi program. Sehingga diharapkan terjadi perubahan pada penerima BLPS yang semula sangat miskin menjadi miskin, bahkan diharapkan dapat keluar dari garis kemiskinan. Namun BLPS tidak sepenuhnya sama dengan program bantuan tunai seperti BLT, BLSM atau PSKS yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Letak perbedaan BLPS dengan program bantuan tunai lainnya terletak pada syarat yang mewajibkan penerima program memenuhi komitmen pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan BLPS. Sedangkan pada program BLT, BLSM atau PSKS tidak mewajibkan adanya persyaratan tersebut.

Implementasi BLPS di Kabupaten Nagekeo telah berjalan selama empat tahun. Terjadi penurunan jumlah kemiskinan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan capaian penurunan angka kemiskinan Nasional, maka capaian penurunan tersebut sangat signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai bagaimana sesungguhnya implementasi Program penyaluran penanggulangan kemiskinan melalui bantuan langsung peberdayaan social pada Desa Tutubhada Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan hubungan antara desain PBLPS sebagai sebuah kebijakan publik dengan realitas implementasi yang dilakukan oleh implementor program di Kecamatan Aesesa Selatan. Proses implementasi

PBLPS tersebut meliputi kegiatan penetapan sasaran (targeting), pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok KUBE, penyaluran bantuan, verifikasi komitmen dan pemutahiran data KUBE. Selain siklus tersebut, terdapat beberapa kegiatan pendukung yang turut mempengaruhi implementasi BLPS, kegiatan tersebut meliputi koordinasi dan sosialisasi, rapat koordinasi tingkat kabupaten dan kecamatan. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan hasil pemikiran penulis yaitu` model implementasi Mazmanian yang menggunakan tiga indikator implementasi kebijakan publik. Indikator tersebut meliputi karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan, variabel lingkungan.